



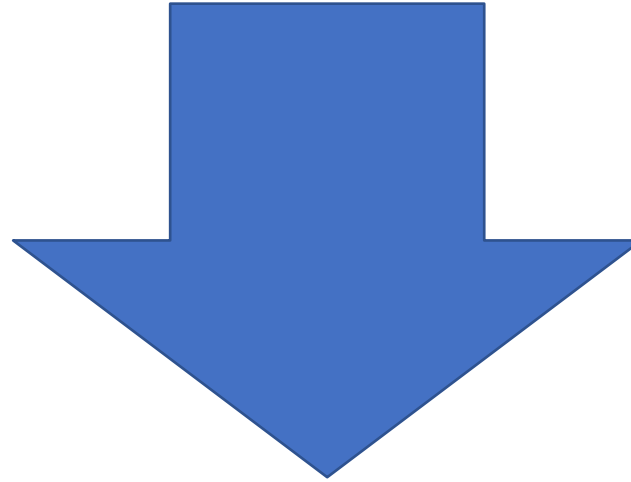
Pertemuan Ke : 14

Good Governance



IBI20206
KEWARGANEGARAAN

POSISI DAN ARTI PENTING PEMBELAJARAN

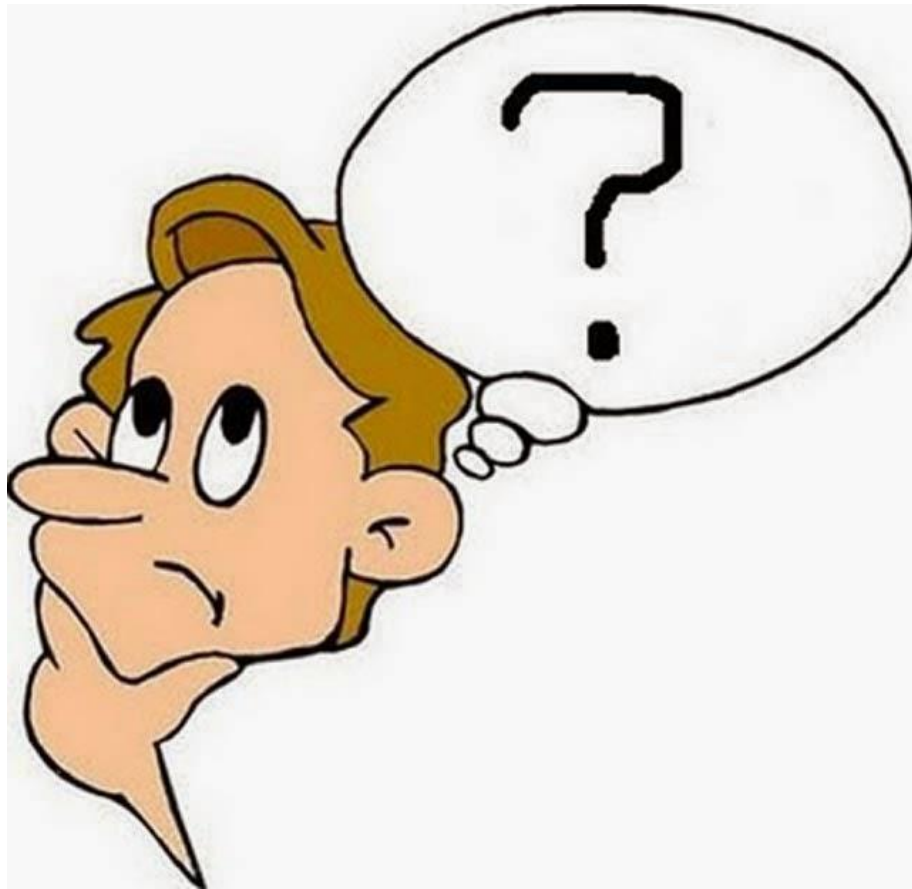


mahasiswa memahami tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) agar mahasiswa dapat berpartisipasi dengan benar dalam sistem pemerintahan dan memiliki sikap kritis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Outcomes Prores Pembelajaran

Taxonomi Bloom	Outcomes
Memorizing	Mahasiswa memiliki pengetahuan yang benar tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
Comprehension	Mahasiswa mampu menerjemahkan wujud pemerintahan yang baik dan memiliki sikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Application	Mahasiswa menunjukkan partisipasi aktif dalam menciptakan <i>good governance</i> di segala tingkatan.

Apa itu Good Governance?





PENGERTIAN



- *Governance* = Tata Pemerintahan
- *Good Governance* = Tata Peme-rintahan yang Baik
- *Bad Governance* = Tata Peme-rintahan yang Buruk



Apa itu Good Governance?



- *Good governance* sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan *stakeholder* dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi dan persamaan hak
- Menurut Bank Dunia (World Bank) *Good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009).
- Menurut UNDP (United National Development Planning) *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan

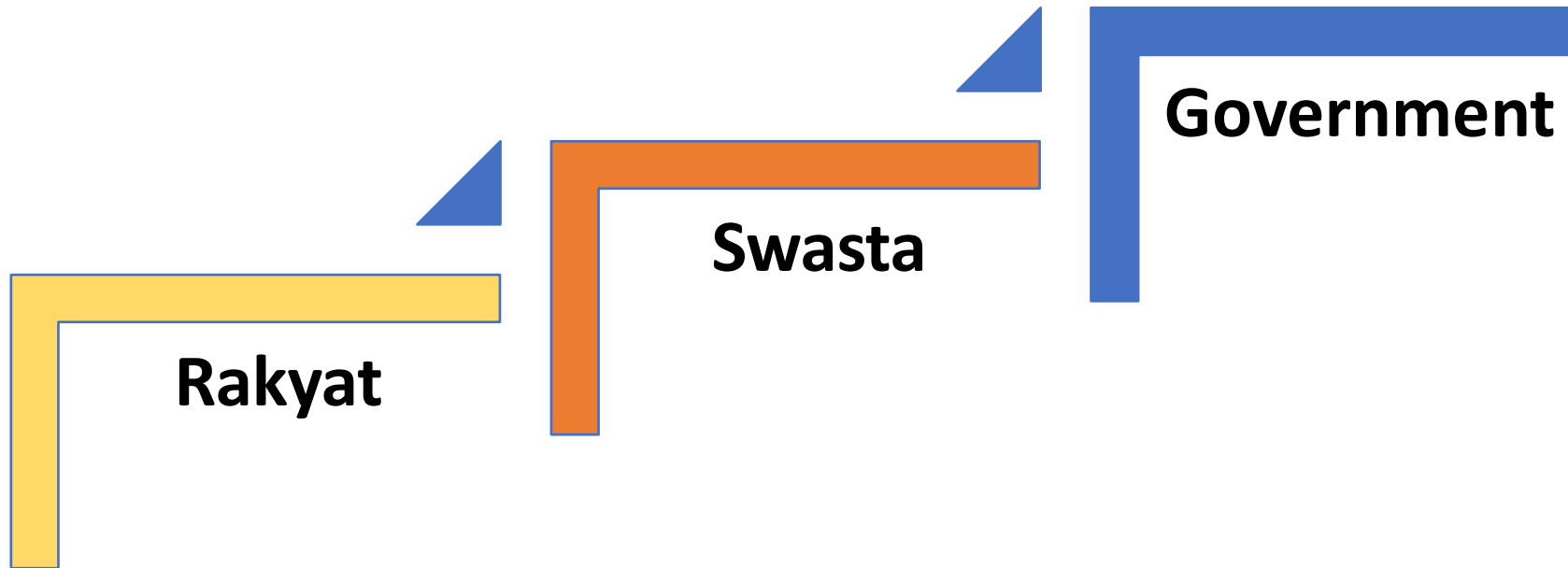
BAGAIMANA DENGAN GOOD GOVERNANCE?

Birokrasi harus bekerja dengan prinsip-prinsip:

1. Akuntabilitas
2. Tranparansi
3. Keterbukaan
4. Peduli pada stakeholder
5. Kesetraaan
6. Efisiensi dan efektivitas
7. Visi Strategis

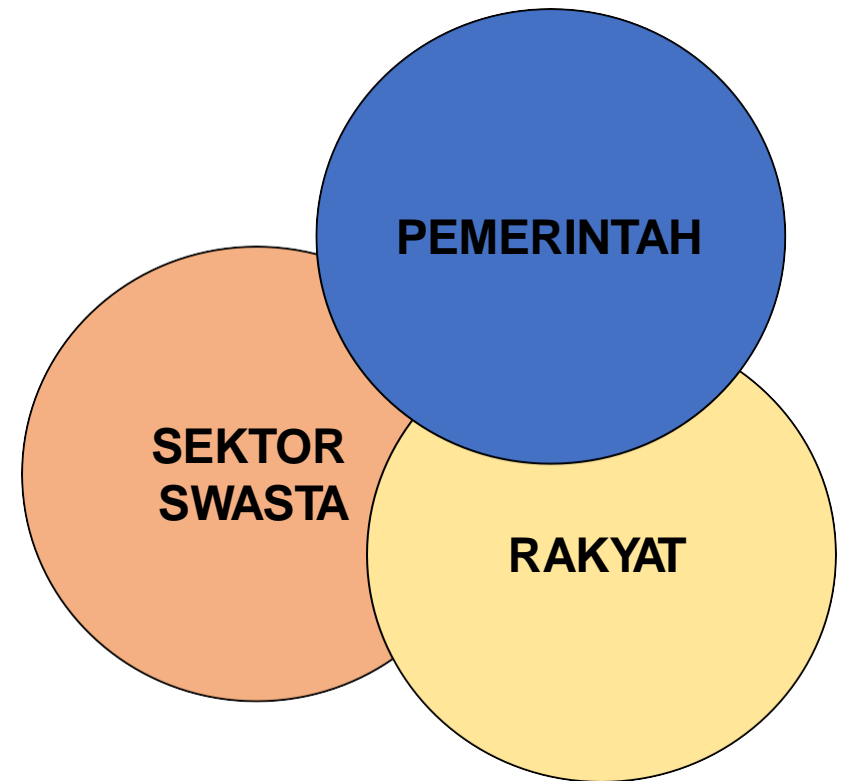


AKTOR/KOMPONEN DALAM MENJALANKAN GOVERNANCE



KESEIMBANGAN TIGA KOMPONEN

- Pemerintah berfungsi pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.
- Swasta berfungsi penggerak aktifitas ekonomi.
- Rakyat merupakan obyek dan subyek berperan serta dalam sektor swasta dan pemerintahan.

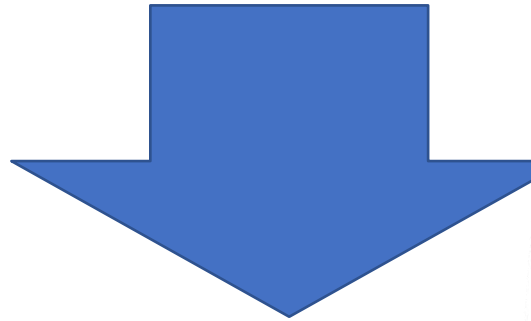


PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE

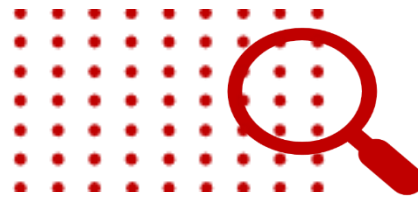
- 1. Partisipasi (*Participation*)** Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)** Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.



KARAKTER DALAM MENEGAKKAN RULE OF LAW



- 1. Supremasi hukum (the supremacy of law);*
- 2. Kepastian hukum (legal certainty);*
- 3. Hukum yang responsif;*
- 4. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;*
- 5. Independensi peradilan.*

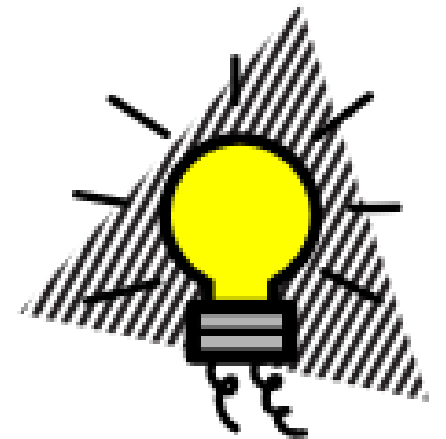


3. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan.

Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. Setidaknya ada 8 aspek yaitu:

1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat publik
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat





4. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

5. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.

6. Keadilan (*Equity*)

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan

7. Efektifitas (Effectiveness) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.



Pemerintahan Yang Akuntabel



- Mengikis Budaya Paternalistik : Mengembangkan budaya egaliter sehingga posisi anatar pejabat, pegawai pemerintah dan pengguna jasa publik adalah sama.



Merampingkan struktur dan memperkaya fungsi :
mengurangi penambahan satuan susunan organisasi



Menegakkan kriteria efektivitas dan efisiensi : tidak hanya tujuan dan tugas-tugasnya tercapai tetapi akuntabilitas dapat tercapai jika efisiensi juga mendapat prioritas



Sistem penggajian berdasarkan kinerja : kecenderungan sistem penggajian diberikan tidak berdasarkan prestasi/kemampuan dan pengabdian ke pada masyarakat, tetapi secara subjektif.



Memupuk semangat kerjasama dan mengutamakan sinergi : harus ada koordinasi dan komunikasi teknis yang lebih efektif.



Mengakomodasi kritik dari publik : kecenderungan kritik dari publik diabaikan, kritik dari publik diperlukan untuk meningkatkan kinerja aparat birokrat.

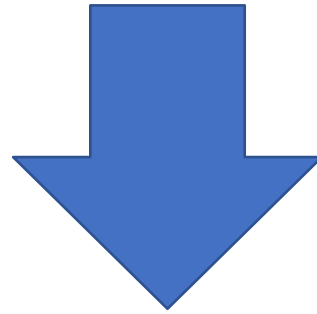


Membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang bertanggung jawab : hambatan yang sering kita jumpai apabila tidak ada pendelegasian wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan.



Orientasi kepada pelayanan pengguna jasa : kurang berorientasinya birokrasi pelayanan ke pada publik. kedaulatan pengguna jasa harus diperhatikan dan lebih responsif terhadap keinginan rakyat sebagai pengguna jasa.

Tugas Pribadi dan di tulis tangan kemudian upload di LMS.



**Coba analisis salah satu pemerintahan yang ada di daerah Anda!
Menurut Anda sudahkah Pemda tersebut menunjukkan good
governance? Tunjukkan di mana letak kelebihan dan kekurangannya.**

Thank You!

